



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2024



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BLITAR**

Agustus 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas berkat Rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 disusun dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam proses penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, serta dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan dinamika yang ada.

Dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 terdiri atas 5 Bab yaitu Pendahuluan; Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu; Tujuan dan Sasaran PD; Rencana Kerja dan Pendanaan PD; dan Penutup. Dokumen ini telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama satu tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya, baik untuk mendukung visi misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Akhir kata semoga Dokumen Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 ini dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan Pembangunan Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan dalam rangka memantapkan produktivitas ekonomi daerah yang berorientasi ekspor dan perluasan pasar melalui penguatan SDM, infrastruktur dan stabilitas social politik.

Agustus, 2023

Tim Penyusun
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu & Capaian Renstra	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	10
2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	32
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5. Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	54
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	55
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	55
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	56
3.3. Program dan Kegiatan	57
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	74
BAB V PENUTUP	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang tersebut mendefinisikan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan memiliki peran sentral sebagai acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan, dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya yang tersedia, serta mempertimbangkan dinamika pembangunan yang ada. Dengan adanya perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan dapat dirumuskan program dan kegiatan yang dikelola secara efektif, efisien, terintegrasi, berkeadilan, dan berkelanjutan, sehingga akan bermuara pada hasil pembangunan yang optimal. Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal ini mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud terdiri dari perencanaan jangka panjang untuk 20 tahun (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD), perencanaan jangka menengah untuk 5 tahun (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD) dan perencanaan jangka pendek atau tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) menegaskan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib membuat Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja untuk kurun waktu selama 1 (satu) tahun.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah yang dijabarkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perencanaan

pembangunan daerah tersebut harus disusun oleh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pihak yang memiliki kewenangan, dengan melakukan penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur program kegiatan. Hal ini dilakukan untuk menjamin linearitas antar dokumen perencanaan antar level baik pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah sesuai tugas dan fungsinya, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 84 ayat (1) disebutkan perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 37 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang RKPD, maka Perangkat Daerah menyusun Dokumen tersebut dan disahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan dengan sebelumnya menyampaikan dokumen tersebut kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada perencanaan strategis. Perencanaan strategis tersebut meliputi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk jangka waktu satu tahun. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar disusun dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Blitar yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *outcome* dan *output* yang akan diwujudkan pada tahun 2024 dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2024, selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573);
7. .Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2024 I-8 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2024 I-9 Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2024 I-10 27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik –Bangkalan– Mojokerto – Surabaya–Sidoarjo– Lamongan-Kawasan Bromo – Tengger– Semeru Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
25. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2024 I-11 Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 35. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721); RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2024 I-12
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 46. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .. Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);

40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011– 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2024 I-13 Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 10/E);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
49. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
50. Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
51. Peraturan Bupati Blitar Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar;

52. Peraturan Bupati Blitar Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
53. Surat Edaran Bupati Blitar Nomor : B/900.01.04.01.01.02/287/409/2023 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Renja-PD Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan dan anggaran perangkat daerah dalam rangka mendukung terwujudnya produktivitas ekonomi daerah yang mantap, berorientasi ekspor dan perluasan pasar melalui penguatan SDM, infrastruktur dan stabilitas social politik.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran perangkat daerah;
- b. Sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan program kegiatan;
- c. Menyediakan instrumen evaluasi bagi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran tahun berjalan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian penjabaran dari Tabel Rencana Program dan Kegiatan

BAB. V. PENUTUP

Berisi catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mengacu pada APBD tahun berjalan yang telah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan Renja tahun sebelumnya. Adapun hasil dari evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tahun lalu dan capaian Renstra tersaji dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2022

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP PD	70 / B	70,18/BB	100,26
2	Meningkatnya Kinerja Perdagangan	PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	4.662,83	5.091,15	109,19
3	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan	PDRB Industri Pengolahan (ADHK)	3.535	3.997,12	113,07

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun 2022

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dilakukan terhadap capaian kinerja program kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Program Kegiatan

Realisasi kinerja Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2022 disajikan pada tabel 2.1. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada Tahun 2022 merencanakan untuk melaksanakan 9 program, 18 kegiatan dan 42 sub kegiatan. Berdasarkan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja yang dilaksanakan secara periodik maka diketahui bahwa 12 kegiatan telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, 2 kegiatan melampaui target dan 4 kegiatan

yang lain belum memenuhi target yang ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja kegiatan adalah 100,64%.

Kegiatan yang dapat melampaui target yang *pertama* adalah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan dengan capaian kinerja 150%. Kegiatan *kedua* adalah Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dapat melakukan fasilitasi 116,33% dari target yang ditetapkan. Nilai ini berasal dari validasi IKM yang telah dilakukan mulai tahun 2020 sampai tahun 2022.

Adapun kegiatan yang tidak mencapai target adalah kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi dagang mencapai 95% dari target yang ditetapkan. Menyikapi hal ini, kegiatan promosi dan misi dagang tetap dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia dengan komoditas unggulan akan ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.

Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan mencapai persentase UTTP yang sesuai standar sebesar 52,56% dari yang ditargetkan.

Secara umum capaian kinerja program kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada tahun 2022 telah melampaui target renstra pada tahun berjalan, sehingga telah dilakukan reviu terhadap target kinerja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2023 serta penyesuaian target kinerja tahun 2024.

Secara terperinci Capaian Kinerja Program Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s.d Tahun 2022
Kabupaten Blitar

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Akhir Masa Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun (n- 3)/2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan							
									Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)						
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan	6	Persen	-5,84%	5	Persen	10	Persen	200%	5	Persen	5	Persen	83	%
						Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	95	Persen	100%	90	Persen	99,6 4	Persen	110%	100	Persen	98	Persen	103	%
3	30	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100	%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan n (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Akhir Masa Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun (n- 3)/2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan					
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2023		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)		
1						2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
3	30	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33	Dokumen	3 Dokum en	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	7 Dokumen	18 Dokumen	55	%				
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	Laporan	0 Lapora n	0 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0 Laporan	0	%				
3	30	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33	Laporan	7 Lapora n	8 Laporan	10 Laporan	125%	7 Laporan	17 Laporan	51,5	%				
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100	Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100	%				
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	346	Orang/ bulan	63 Orang/ Bulan	65 Orang/ bulan	50 Orang/ bulan	77%	52 Orang/ bulan	165 Orang/ bulan	48	%				
3	30	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	Dokumen	12 Dokum en	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36 Dokumen	60	%				

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Akhir Masa Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun (n- 3)/2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan					
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2023		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)		
1						2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)		
3	30	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	85	Dokumen	17 Laporan	17	Laporan	18	Laporan	106%	17	Dokumen	52	Laporan	61	%
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100	%
3	30	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	34	Orang	6 Orang	7	Orang	7	Orang	100%	7	Orang	20	Orang	59	%
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100	%
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23	Paket	4 Paket	1	Paket	1	Paket	100%	6	Paket	11	Paket	48	%
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26	Paket	4 Paket	1	Paket	1	Paket	100%	7	Paket	10	Paket	46	%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan n (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Akhir Masa Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun (n- 3)/2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan						
										Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)					
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)			
3	30	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	Paket	6 Paket	1	Paket	1	Paket	100%	6	Paket	13	Paket	52	%
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	12 Paket	1	Paket	1	Paket	100%	6	Paket	19	Paket	32	%
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40	Paket	8 Paket	8	Paket	8	Paket	100%	6	Paket	22	Paket	55	%
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350	Laporan	139 Lapora n	70	Laporan	139	Laporan	199%	50	Laporan	331	Laporan	95	%
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100	%
3	30	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	82	Unit	0 Unit	22	Unit	20	Unit	91%	20	Unit	40	Unit	49	%
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	Unit	0 Unit	20	Unit	7	Unit	35%	5	Unit	12	Unit	30	%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Akhir Masa Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun (n- 3)/2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan			
										Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)		
1					2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100 %
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	24 Lapora n	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	48 Laporan 80 %
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	12 Lapora n	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36 Laporan 60 %
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100	Persen	100%	100	Persen	97,5 4	Persen	100%	100	Persen	98 Persen 98 %
3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	1 Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	3 Unit 50 %

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Akhir Masa Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun (n- 3)/2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)	
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)
3	30	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	204	Unit	35 Unit	46 Unit	44 Unit	96%	35 Unit	114	Unit	56 %
3	30	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	163	Unit	0 Unit	85 Unit	20 Unit	24%	26 Unit	46	Unit	28 %
3	30	01	2.09	09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	5	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3	Unit	60 %
3	30	02				Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk	100	Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100	Persen	100 %
3	30	02	2.01			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah rekomendasi teknis Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan	45	Rekomend asi	3 Rekom endasi	12 Rekomend asi	31 Rekomend asi	258%	4 Rekomend asi	36 Rekomend asi	80 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Akhir Masa Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun (n- 3)/2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 30 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	18 Dokumen	Na	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	4 Dokumen	4 Dokumen	22 %
3 30 02 2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota	75 Persen	Na	50 Persen	0 Persen	0	50 Persen	50 Persen	67 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Akhir Masa Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun (n-3)/2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan						
										Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2023		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)			
1					2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)			
3	30	02	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	20	Laporan	Na	4	Laporan	4	Laporan	-	4	Laporan	8	Laporan	40	%
3	30	03			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100	Persen	85 %	85	Persen	92	Persen	108%	92	Persen	92	Persen		%
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan dikelola dengan baik	52	Unit	10 Unit	13	Unit	13	Unit	100%	13	Unit	33	Unit	64	%
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	13	Unit	13 Unit	10	Unit	10	Unit	100%	1	Unit	8	Unit	62	%
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	65	Unit	13 Unit	13	Unit	13	Unit	100%	13	Unit	13	Unit	100	%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Akhir Masa Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun (n- 3)/2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)	
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	434	Orang	83 Orang	85 Orang	84 Orang	99%	85 Orang	249	Orang	57	%
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	10	Dokumen	2 dokum en	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6	Dokumen	60	%
3	30	04			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	75	Persen	10%	50 Persen	66,67 Persen	133%	65 Persen	67	Persen	89	%
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pasar terpantau Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di pasar	30	Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	100%	6 Kali	18	Kali	60	%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Akhir Masa Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun (n-3)/2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan					
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2023		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)		
1						2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)		
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	30	Laporan	6 Lapora n	6	Laporan	6	Laporan	100%	6	Laporan	24	Laporan	80	%
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	30	Laporan	5 Lapora n	6	Laporan	4	Laporan	67%	6	Laporan	31	Laporan	103	%
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	20	Kali	4 Kali	4	Kali	4	Kali	-	4	Kali	12	Kali	60	%
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	20	Laporan	4 Lapora n	4	Laporan	4	Laporan	100%	4	Laporan	12	Laporan	60%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Akhir Masa Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun (n- 3)/2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2023		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)		
1						2	3	4		5	6		7		8=(7/6)		9	10=(5+7+9)		11=(10/4)
3	30	05				Program Pengembangan Ekspor	Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan	30	Persen	178,9 %	4,7 5	Persen	0,75 Persen	56%	20 Persen	3,7 Persen	12,3 %			
3	30	05	2.01			Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang	30	Persen	19%	20 Persen	54,5 4 Persen	273%	20 Persen	31 Persen	104 %				
3	30	05	2.01	01		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	145	Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	140%	25 Pelaku Usaha	85 Pelaku Usaha	59 %				
3	30	05	2.01	02		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	47	Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	45 Pelaku Usaha	113%	25 Pelaku Usaha	85 Pelaku Usaha	181 %				
3	30	05	2.01	03		Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang tingkat lokal	150	Pelaku Usaha	18 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	167%	20 Pelaku Usaha	99 Pelaku Usaha	66%				
3	30	05	2.01	04		Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	12.. 88	Pelaku Usaha	18 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	18 Pelaku Usaha	180%	20 Pelaku Usaha	56 Pelaku Usaha	64 %				

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Akhir Masa Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun (n- 3)/2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan						
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2023		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)			
1						2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)			
3	30	06				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	75	Persen	-50%	8,3	Persen	549,75	Persen	6623 %	65	Persen	65	Persen	87	%
3	30	06	2.01			Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang sesuai standar	92	Persen	6,57%	85	Persen	54,2 5	Persen	64%	85	Persen	70	Persen	82	%
3	30	06	2.01	01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	14.5 00	Unit	2.124 Unit	5.9 70	Unit	6.71 4	Unit	112%	10.00 0	Unit	6.279	Unit	43	%
3	30	06	2.01	02		Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	2.65 0	Orang	175 Orang	500	Orang	967	Orang	193%	400	Orang	1.367	Orang	52	%
3	30	07				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten	75	Persen	0	50	Persen	91	Persen	182%	65	Persen	65	Persen	87	%
3	30	07	2.01			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	140	Orang	100 Orang	30	Orang	30	Orang	100%	30	Orang	160	Orang	114	%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Akhir Masa Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun (n- 3)/2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan						
										Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)					
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)				
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	85	UMKM	0	5	UMKM	10	UMKM	200%	20	UMKM	30	UMKM	35	%
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
3	31	02			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri	100	Persen	75%	75	Persen	75	Persen	100%	93	Persen	92,5	Persen	1,675	%
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	41	Fasilitasi	5 Fasilitasi	10	Fasilitasi	9	Fasilitasi	90%	10	Fasilitasi	24	Fasilitasi	59	%
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	3	Dokumen	1 Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	50%	1	Dokumen	3	Dokumen	100	%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Akhir Masa Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun (n- 3)/2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan					
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2023		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)		
1						2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)		
3	31	02	2.01	02		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	7	Dokumen	0 Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	-	2	Dokumen	2	Dokumen	29%
3	31	02	2.01	03		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	20	Dokumen	0	1	Dokumen	2	Dokumen	67%	3	Dokumen	5	Kali	25 %
3	31	02	2.01	04		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	15	Dokumen	0	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	0	Dokumen	2	Dokumen	13 %
3	31	02	2.01	05		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat yang dilaksanakan	24	Kali	0	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	3	Dokumen	5	Persen	21 %
3	31	03				Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase rekomendasi teknis perizinan	100	Persen	0	100	%	100	%	100%	100	Persen	100	Persen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Akhir Masa Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun (n- 3)/2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan								
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)							
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)
						industri yang diterbitkan											
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	33	Rekomendasi	Na	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	100%	6 Rekomendasi	12	Rekomendasi	36	%
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sector perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha industri kecil dan industri menengah yang berlokasi di satu Kab/Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	20	Dokumen	0	0 Dokumen	4 Dokumen	400%	4 Dokumen	8	Dokumen	40	%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan n (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Akhir Masa Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun (n- 3)/2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan						
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2023		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)			
1						2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)			
3	31	4				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase peningkatan penyediaan informasi industri	0,02	Persen	0,45%	0,33	Persen	9,4	Persen	2848 %	0,02	Persen	25	Persen	61	%
3	31	04	2.01			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penyediaan informasi industri	6.900	Fasilitasi	16.867 Fasilitasi	400	Fasilitasi	2137	Fasilitasi	534%	400	Fasilitasi	2537	Fasilitasi	37	%
3	31	04	2.01	01		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	9	Dokumen		2	Dokumen	2	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	33	%

B. Capaian Kinerja Anggaran

Realisasi kinerja anggaran yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada tahun 2022 disajikan pada tabel 2.1. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada Tahun 2022 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 13.533.845.968,- dan terealisasi Rp. 12.861.269.347,- (95%) untuk melaksanakan 8 program dan 18 kegiatan.

Tabel 2.2 Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2022

Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (%)
Rutin	8.720.425.799	8.400.202.140	96,33
Pembangunan	4.813.420.169	4.461.067.207	92,68
Total	13.533.845.968	12.861.269.347	95

C. Capaian Kinerja Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan merupakan sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar namun merupakan salah satu *outcome* dari pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang dan retribusi pasar. Masa *recovery* pasca pandemi COVID-19 relatif berpengaruh terhadap pencapaian target PAD dari retribusi pasar dan tera/tera ulang kemetrolitian tahun 2022, yaitu tercapai Rp. 3.736.187.500,- (88%) dari target Rp. 4.016.015.000,-

Tabel 2.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar
Per 31 Desember 2022

No.	Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Keterangan
	<i>Retribusi Jasa Umum</i>				
1	Retribusi Pasar	3.716.015.000	3.484.615.500	93%	Tidak Tercapai
2	Retribusi Tera/Tera Ulang	300.000.000	251.572.000	84%	Tidak Tercapai
	JUMLAH	4.016.015.000	3.736.187.500	88%	Tidak Tercapai

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dalam implementasi kinerja pelayanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada tahun 2022 memberikan kontribusi bagi pencapaian Misi ke-3 yaitu “Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas” dan Misi ke-4 yaitu “Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan” dengan sasaran strategis 1) meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah; 2) meningkatnya kinerja perdagangan; dan 3) meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan. Pencapaian sasaran tersebut ditandai dengan capaian rata-rata variabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan relatif menggembirakan di tengah berbagai tantangan recovery pasca Pandemic Covid-19, sehingga mampu mendorong pencapaian sasaran strategis melalui pencapaian outcome pembangunan daerah yang diharapkan pada urusan perdagangan dan industri pengolahan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4 sebagai berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar

No	Indikator	Satuan	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Analisis
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	- Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	100	99,9	98	100	100	Target kemungkinan tidak bisa tercapai 100% karena asset belum 100% yang layak pakai.
	- Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan	%	5	5	6	6	10	5	6	6	Pertumbuhan retribusi 5% merupakan angka yang relative rasional mengingat belum ada penambahan objek pungut
2	Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan sesuai aturan yang berlaku
3	Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	%	85	92	92	92	92	92	92	92	Dari 13 pasar rakyat yang diampu oleh Disperindag ada 1 pasar yang rusak berat akibat kebakaran sehingga pada 2023 belum bias dilakukan pengelolaan.
4	Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	50	65	75	75	66,67	67	75	75	Pemantauan ketersediaan barang kebutuhan pokok serta stabilitas harga dilaksanakan di 6 pasar yang telah ditetapkan.
5	Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan	%	20	20	30	30	2,66	1,05	3	5	Nilai ekspor perdagangan pasca Pandemic Covid-19 masih relative rendah peningkatannya karena di beberapa negara tujuan ekspor masih menerapkan pembatasan.

No	Indikator	Satuan	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Analisis
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6	Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	60	65	72	75	538	65	30	35	Pelayanan kemetrologian dilaksanakan sesuai jumlah hari sidang tera yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dana kegiatan
7	Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten	%	65	65	75	75	90,9	93	90	90	Hingga TW II capaian penyerapan anggaran makmin se-Kab sekitar 40% sehingga diprediksi akhir tahun tercapai 93%
8	Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri	%	87.5	92.5	95	100	75	92,5	95	100	Pada akhir TW II capaian perencanaan dan pembangunan industry adalah 75%, diharapkan akhir TA. 2023 Dokumen RPIK dapat disahkan dan outcome pembangunan industry tercapai.
9	Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan terhadap jumlah permohonan yang masuk	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Penerbitan rekomendasi teknis harus sesuai dengan aturan yang berlaku baik isi/ contain nya maupun batas waktu palayanan yang diberikan.
10	Persentase peningkatan penyediaan informasi industri	%	0.33	0.02	0.02	0.02	-7,14	15,4	25	0	Pada akhir TW II 2023 produsen data industry belum mengupdate data sesuai aturan yang berlaku yaitu data bahan bakar IKM, dan baru akan merilis update data per 31 Desember 2023 (per tahun)

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.3.1 Tantangan dan Peluang

Permasalahan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan di bidang Perindustrian dan Perdagangan diantaranya adalah :

- a. Lemahnya peta industri potensial, masih rendahnya akurasi database sektoral perindustrian dan perdagangan;
- b. Belum tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi baik;
- c. Kurangnya tenaga teknis di bidang perindustrian dan perdagangan yang berkompeten;
- d. Belum terbangunnya sistem informasi perindustrian dan perdagangan;
- e. Belum optimalnya pelaksanaan SOP; dan
- f. Kurangnya sarana dan prasarana (pasar, metrologi, display IKM)

Adapun tantangan yang masih ditemui hingga saat ini adalah :

- a. Tingginya jumlah IKM yang masih memproduksi secara konvensional yang mempengaruhi kualitas produknya;
- b. Rendahnya kualitas manajerial IKM;
- c. Masih banyak IKM yang belum bersertifikat / terstandarisasi (Merek, Halal, ISO, SNI, UN);
- d. Kemajuan teknologi;
- e. Luasnya wilayah pembinaan dan perbedaan kondisi geografis; serta
- f. Lesunya ekonomi global.

Beberapa peluang yang dapat diambil adalah:

- a. Pemberian fasilitasi oleh pemerintah dan *stakeholders* dalam mensupport peningkatan kualitas dan kuantitas produk industri pengolahan berupa pelatihan-pelatihan secara online serta fasilitasi sertifikasi HAKI sehingga meningkatkan daya saing;
- b. Semakin mendominasinya pemanfaatan teknologi industri 4.0 dan jaringan pemasaran digital bagi produk unggulan daerah sebagai akses pandemi Covid-19;
- c. Penumbuhan sentra-sentra industri produk unggulan lokal yang beraneka ragam secara lebih massif;
- d. Bertumbuhnya industri-industri dan pemasaran yang lebih kreatif untuk merebut pangsa pasar.

2.3.2 Isu – Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang turut melatarbelakangi penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan industri berbasis sentra-sentra industri perlu dikembangkan dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian, baik dalam kontribusi pada PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan menciptakan *branding* daerah.
- b. Revitalisasi pasar rakyat perlu terus dikembangkan untuk pengembangan pasar produk unggulan daerah dan melayani kebutuhan masyarakat, peningkatan kontribusi pada PDRB dan PAD.
- c. Perencanaan pembangunan dan pengembangan industri perlu dikaji ulang agar lebih komprehensif dan berkelanjutan melalui penetapan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan industri di daerah.
- d. Perlu optimalisasi perlindungan konsumen melalui uji UTTP, pengawasan standardisasi produk, edukasi, dan pengendalian harga bahan pokok dan barang penting.
- e. Perlunya kerja sama perdagangan dan industri antar daerah maupun dengan swasta untuk perluasan pasar produk unggulan daerah serta diintegrasikan dengan *e-commerce*.
- f. Perlunya *updating* data industri dan perdagangan yang diintegrasikan dengan system informasi industri dan perdagangan.
- g. Perlunya *upgrading* SDM di bidang perindustrian dan perdagangan secara berkelanjutan yang disertai dengan *rewards and punishment* yang jelas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperhatikan bauran hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, situasi dan tantangan perekonomian daerah, kerangka pendanaan pembangunan daerah dan sinergi pembangunan antara daerah dan nasional, maka perlu dirumuskan sasaran dan tema pembangunan daerah yang tepat.

Sesuai dengan Surat Edaran Bupati Blitar Nomor: B/900.01.04.01.01.02/287/409/2023 tanggal 11 Juli 2023, tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah “Memantapkan Produktivitas Ekonomi yang Berorientasi Ekspor dan Perluasan Pasar melalui Penguatan SDM, Infrastruktur, dan Stabilitas Sosial Politik”, terdiri dari 4 prioritas pembangunan yang terdistribusi kepada perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dinas

Perindustrian dan Perdagangan mendukung pencapaian prioritas pembangunan keempat yaitu “Penguatan Komoditas Unggulan yang Berorientasi Industri, Ekspor, dan Perluasan Pasar” melalui 3 (tiga) program prioritas sebagai berikut :

- a. Program Pembangunan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri,
- b. Program Pengembangan Ekspor
- c. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Blitar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	9.719.441.770	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	8.285.975.000	
			Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan	5%				Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan	10%		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100 Persen	80.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100 Persen	50.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	7 dokumen	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	31.200.000	Penyusunan Reviu Renstra, Ranwal Renja, Renja, Renja-P, RKA, RKA-P Perkin

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	0	Penyusunan LPPD, LKPJ, LKjIP, SAKIP
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	25.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	18.800.000	Penyusunan Laporan-laporan Kinerja Semester I dan II, Rencana Aksi dan Evaluasi
2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel</i>	<i>100 persen</i>	<i>6.437.447.932</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel</i>	<i>100 persen</i>	<i>4.990.380.000</i>	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/Bulan	6.287.447.932	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/Bulan	4.940.264.000	Realisasi gaji dan Tunjangan ASN
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	360 Dokumen	125.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	360 Dokumen	42.300.000	- Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan - Honorarium Penanggungjawab pengelola keuangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17 Dokumen	7.816.000	Pelaporan akuntansi dan keuangan
3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>100 persen</i>	150.000.000	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>100 persen</i>	250.000.000	
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Blitar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Blitar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	250.000.000	Menugaskan ASN diklat formal
8	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 orang	50.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 orang	-	
4	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel</i>	<i>100 persen</i>	384.500.000	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel</i>	<i>100 persen</i>	80.821.902	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2.204.460	Belanja komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	70.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.897.190	Belanja peralatan dan perlengkapan kantor
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6 Paket	8.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6 Paket	2.205.792	Alat kebersihan
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	6.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	0	Pengadaan minuman kantor
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Blitar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Blitar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	5.534.460	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53 Laporan	235.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53 Laporan	68.730.000	- Perjalanan dinas dalam dan luar kota - BBM - Cinderamata - Mamin rapat dan tumpeng
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	400 Dokumen	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	400 Dokumen	450.000	Belanja pengelolaan arsip dinamis
5	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran</i>	<i>100 persen</i>	<i>197.426.451</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran</i>	<i>100 persen</i>	<i>-</i>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Blitar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	50.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Blitar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0	
17	Pengadaan Mebel	Kab. Blitar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	25.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Blitar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0	
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 Unit	146.044.400	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 Unit	0	
6	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu</i>	<i>100 Persen</i>	<i>2.424.464.475</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu</i>	<i>100 persen</i>	<i>2.809.385.400</i>	
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	195.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	181.155.000	Pembayaran telepon kantor dan listrik
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.123.299.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.628.230.400	Penyediaan honorarium dan asuransi THL
7	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	<i>100 persen</i>	<i>485.000.000</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</i>		<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	<i>100 persen</i>	<i>105.387.698</i>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Daerah dalam kondisi baik</i>			<i>Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Daerah dalam kondisi baik</i>			
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Blitar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Blitar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.635.000	Belanja pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	90.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	60.722.698	Belanja pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional /lapangan
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	85 unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	35 unit	2.030.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin
24	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	320.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	0	Rehabilitasi plafon ruang kerja bidang perdagangan dan pasar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk	100%	72.394.768	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk	100%	10.240.000	
8	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Rekomendasi	32.394.768	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Rekomendasi	5.120.000	
25	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Blitar	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	32.394.768	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Blitar	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	5.120.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	<i>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Persentase pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>50%</i>	<i>40.000.000</i>	<i>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Persentase pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>50%</i>	<i>5.120.000</i>	
26	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	4 Laporan	10.000.000	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	4 Laporan	0	
27	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	5 Dokumen	10.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	5 Dokumen	0	
26	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap	4 Laporan	10.000.000	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2,	4 Laporan	5.120.000	Pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	maupun Produsen B2 (P-B2)		Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)			Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)			
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	92%	2.068.873.508	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	92%	535.000.000	
10	<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>		<i>Jumlah sarana distribusi perdagangan</i>	<i>13 Unit</i>	<i>1.947.873.508</i>	<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>		<i>Jumlah sarana distribusi perdagangan</i>	<i>13 Unit</i>	<i>506.180.000</i>	
27	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Blitar	<i>Jumlah sarana distribusi perdagangan</i>	<i>13 Unit</i>	<i>1.725.646.572</i>	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Blitar	Jumlah sarana distribusi perdagangan	<i>13 Unit</i>	<i>455.613.200</i>	
28	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Blitar	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	13 Unit	60.500.000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Blitar	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	13 Unit	50.566.800	- Penyusunan laporan pendapatan retribusi pasar - Pengendalian dan penataan pedagang pasar
11	<i>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</i>		<i>Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina</i>	<i>85 Orang</i>	<i>121.000.000</i>	<i>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi</i>		<i>Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina</i>	<i>85 Orang</i>	<i>28.820.000</i>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						<i>Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</i>					
29	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	121.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	28.820.000	- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola pasar rakyat - Pembuatan leaflet
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	65%	337.229.829	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	75%	53.818.440	
13	<i>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Persentase keterisian kapasitas gudang barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat (terpenuhi 50% - 80%)</i>	50%	46.250.000	<i>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Persentase keterisian kapasitas gudang barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat (terpenuhi 50% - 80%)</i>	50%	0	
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat	4 laporan	46.250.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	4 laporan	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Agen dan Pasar Rakyat			Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			
14	<i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah pasar terpantau Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di pasar</i>	<i>6 Kali</i>	255.979.829	<i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah pasar terpantau Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di pasar</i>	<i>6 Kali</i>	39.893.440	
31	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6 laporan	45.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6 laporan	18.730.000	Pemantauan harga stok barang pokok dan barang penting
32	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6 laporan	210.979.829	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6 laporan	21.163.440	Operasi pasar reguler dan khusus

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	4 kali	35.000.000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	4 kali	13.925.000	
33	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 laporan	35.000.000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 laporan	13.925.000	- Rakor - Monev di tingkat distributor per triwulan
5	Program Pengembangan Ekspor		Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan	20%	1.199.944.349	Program Pengembangan Ekspor		Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan	30%	401.571.570	
15	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang	20%	1.199.944.349	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang	20%	401.571.570	
34	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitasi peningkatan	25 Pelaku Usaha	120.000.000	-	Kab. Blitar	-	25 Pelaku Usaha	-	Pelaksanaan Adi Ekspor

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kapasitas terkait ekspor								
35	Pameran Dagang Nasional	Kab. Blitar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	30 Pelaku Usaha	685.694.349	Pameran Dagang Nasional	Kab. Blitar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	30 Pelaku Usaha	191.765.600	Mengikuti pameran tingkat nasional dan regional
36	Pameran Dagang Lokal	Kab. Blitar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	20 Pelaku Usaha	120.000.000	Pameran Dagang Lokal	Kab. Blitar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	20 Pelaku Usaha	59.128.800	Menyelenggarakan / mengikuti pameran dagang lokal
37	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Blitar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	25 Pelaku Usaha	274.250.000	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Blitar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	25 Pelaku Usaha	43.047.680	Mengikuti Misi Dagang
38	-	-	-	-	-	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Blitar	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	20 Produk	107.629.490	
6	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen		Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	65%	165.995.160	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen		Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	72%	166.000.000	
16	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>		<i>Persentase UTTP yang sesuai standar</i>	<i>85%</i>	165.995.160	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>		<i>Persentase UTTP yang sesuai standar</i>	<i>85%</i>	<i>166.000.000</i>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Blitar	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	14.000 Unit	110.705.434	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Blitar	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	14.000 Unit	117.045.140	- Pelayanan tera/tera ulang - Kalibrasi standar - Pengadaan anak timbangan & portabel power suply - Pemeliharaan alat UTTP
39	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Blitar	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	500 Orang	55.289.726	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Blitar	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	550 Orang	48.954.860	- Jumlah pelaku usaha yang dibina tentang kemetrolagian - Jumlah siaran penyuluhan kemetrolagian - Jumlah WTU yang diawasi
7	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten	65%	738.897.803	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten	90,9%	75.929.990	
17	<i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>		<i>Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri</i>	<i>30 Orang</i>	738.897.803	<i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>		<i>Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri</i>	<i>30 Orang</i>	75.929.990	
40	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail,	20 UMKM	738.897.803	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat	Kab. Blitar	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail,	20 UMKM	75.929.990	- Sosialisasi kemitraan IKM - Kurasi produk IKM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi			Kabupaten/ Kota		Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
8	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri	100%	755.418.858	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri	95%	791.500.000	
18	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	0 Fasilitasi	400.000.000	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota		Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	0 Fasilitasi	791.500.000	
41	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	50.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	0	
42	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen	50.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen	0	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 dokumen	120.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 dokumen	75.000.000	- Fasilitas pelatihan packaging - Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri
44	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	70.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	0	
45	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	110.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	716.500.000	- Fasilitas Standardisasi Uji Nutrisi - Fasilitas sertifikasi HKI dan halal
9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri		Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan terhadap jumlah permohonan yang masuk	100%	140.500.000	Program Pengendalian Izin Usaha Industri		Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan terhadap jumlah permohonan yang masuk	100%	10.000.000	
19	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)</i>	<i>Kab. Blitar</i>	<i>Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan</i>	<i>6 Rekomendasi</i>	140.500.000	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan</i>	<i>Kab. Blitar</i>	<i>Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan</i>	<i>6 Rekomendasi</i>	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Kewenangan Kabupaten /Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</i>					<i>Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</i>					
46	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi	Kab. Blitar	Peningkatan data industri yang terintegrasi dengan SIINAS	1 Dokumen	65.000.000	-	Kab. Blitar	-	1 Dokumen	-	- Sosialisasi SIINas - Fasilitasi rekomendasi ijin
47	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kab. Blitar	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu	1 Dokumen	65.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan	Kab. Blitar	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota	1 Dokumen	5.000.000	- Pemantauan terhadap perizinan industri - Laporan secara periodik

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat			Kabupaten/ Kota		sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat			
48						Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/st andar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	<i>Kab. Blitar</i>	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		Persentase peningkatan penyediaan informasi industri	0,33%	214.918.858	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		Persentase peningkatan penyediaan informasi industri	0,02%	43.500.000	
20	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah fasilitasi penyediaan informasi industri	400 Fasilitasi	214.918.858	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah fasilitasi penyediaan informasi industri	400 Fasilitasi	43.500.000	
48	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 Dokumen	214.918.858	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 Dokumen	43.500.000	- Validasi data industri - Pembangunan database elektronik

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar membuka akses bagi para pemangku kepentingan untuk berperan serta memberikan usulan pembangunan sesuai urusan perindustrian dan urusan perdagangan yang selaras dengan rumusan rancangan Renja melalui Musrenbang Kecamatan dan Pokok Pikir DPRD, namun pada tahun 2023 tidak ada usulan yang masuk.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Blitar

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mengacu pada Misi ke-4 yaitu *"Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan"* maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar yaitu *"Meningkatnya produktifitas sektor unggulan daerah"*.

3.1.1. Renstra Kementerian Perdagangan RI 2020-2024

Kementerian Perdagangan menetapkan Visi 2020-2024 sebagai berikut: ***"Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*** dengan Misi yang diemban sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Sektor Perdagangan.

Adapun Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan adalah:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri;
5. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional;
6. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.

3.1.2. Renstra Kementerian Perindustrian RI 2020-2024

Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 tahun kedepan yaitu “Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional”

Adapun sasaran Renstra Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Non-migas;
- b. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0;
- c. Meningkatkan Kemampuan Industri Dalam Negeri;
- d. Meningkatkan Penguasaan Pasar Industri;
- e. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM);
- f. Meningkatkan Persebaran Industri;
- g. Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif;
- h. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan;
- i. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien;
- j. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian;
- k. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas;
- l. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima;
- m. Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun didasarkan atas rumusan isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra PD. Dengan mengacu pada Misi RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2022-2026 ke-3 yaitu “Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas”, serta Misi ke-4 yaitu “Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan” Misi ke-4, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan produktivitas industri dan perdagangan sektor unggulan daerah.

- Sasaran : a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
b. Meningkatnya kinerja perdagangan
c. Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan

Berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra, maka sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan tata kelola organisasi dan aparatur dengan sasaran terwujudnya manajemen organisasi yang profesional;
- b. Meningkatnya keberdayaan industri dengan sasaran meningkatnya kemampuan dan daya saingnya;
- c. Meningkatkan pengembangan usaha perdagangan melalui promosi dan pengenalan produk unggulan Kabupaten Blitar dengan sasaran meningkatnya jangkauan pemasaran produk unggulan daerah;
- d. Revitalisasi sarana distribusi perdagangan melalui penguatan regulasi dan dengan sasaran pembinaan unit usaha perdagangan;
- e. Perlindungan konsumen berupa pelayanan dan pengawasan Metrologi legal.

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 yang sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar adalah “Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor, dan perluasan pasar”. Adapun Tema Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah “Memantapkan Produktivitas Ekonomi yang Berorientasi Ekspor dan Perluasan Pasar melalui Penguatan SDM, Infrastruktur dan Stabilitas Sosial Politik”.

3.3 Program dan Kegiatan

Berpedoman pada prioritas pembangunan daerah, Renstra Perangkat Daerah 2021-2026, penyelarasan Rancangan Renja PD dengan Rencana Pendanaan Indikatif PD Tahun 2024, serta mempertimbangkan kinerja program kegiatan pada tahun sebelumnya dan isu-isu saat ini, maka pada tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar merencanakan untuk melaksanakan 10 program dengan usulan pagu anggaran sebesar Rp. 10.373.535.000,- guna mendukung pencapaian target kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Ekspor (**program prioritas**)
- b. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (**program prioritas**)
- c. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (**program prioritas**)
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

- f. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- g. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- h. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- i. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- j. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Lembar : 1 dari

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				10.373.535.000				
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				9.528.535.000				15.553.269.164
3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan	Kab. Blitar	6 %	8.285.975.000	DAU		6 %	10.603.305.802
						Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %				100 %	
3	30	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	Kab. Blitar	100 Persen	50.000.000	DAU		100 Persen	85.000.000
3	30	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Blitar	7 Dokumen	31.200.000	DAU		7 Dokumen	55.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Kab. Blitar</i>	4 Laporan	0	DAU		4 Laporan	5.000.000
3	30	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Kab. Blitar</i>	3 Laporan	18.800.000	DAU		3 Laporan	25.000.000
3	30	01	2.02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel</i>	<i>Kab. Blitar</i>	100 Persen	4.990.380.000	DAU		100 Persen	6.758.820.329
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Kab. Blitar</i>	70 Orang/ bulan	4.990.380.000	DAU		70 Orang/ bulan	6.601.820.329
3	30	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Kab. Blitar</i>	360 Dokumen	42.300.000	DAU		360 Dokumen	130.000.000
3	30	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	<i>Kab. Blitar</i>	17 Dokumen	7.816.000	DAU		17 Dokumen	27.000.000
3	30	01	2.05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Kab. Blitar</i>	100 Persen	250.000.000	DAU		100 Persen	150.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
3	30	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	<i>Kab. Blitar</i>	10 Orang	250.000.000	DAU		15 Orang	100.000.000
3	30	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	<i>Kab. Blitar</i>	25 Orang	0	DAU		25 Orang	50.000.000
3	30	01	2.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel</i>	<i>Kab. Blitar</i>	100 Persen	80.821.902	DAU		100 Persen	390.000.000
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	<i>Kab. Blitar</i>	6 Paket	2.204.460	DAU		6 Paket	6.000.000
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	<i>Kab. Blitar</i>	4 Paket	1.697.190	DAU		4 Paket	70.000.000
3	30	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	<i>Kab. Blitar</i>	6 Paket	2.205.792	DAU		6 Paket	8.000.000
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	<i>Kab. Blitar</i>	12 Paket	0	DAU		12 Paket	6.000.000
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	<i>Kab. Blitar</i>	5 Paket	5.534.460	DAU		5 Paket	50.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Blitar	53 Laporan	68.730.000	DAU		53 Laporan	240.000.000
3	30	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Blitar	400 Dokumen	450.000	DAU		400 Dokumen	10.000.000
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	Kab. Blitar	100 Persen	0	DAU		100 Persen	178.547.774
3	30	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Blitar	2 Unit	0	DAU		1 Unit	25.000.000
3	30	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Blitar	2 Unit	0	DAU		2 Unit	25.000.000
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Blitar	8 Unit	0	DAU		8 Unit	128.547.774
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	Kab. Blitar	100 Persen	2.809.385.400	DAU		100 Persen	2.540.937.699
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Blitar	24 Laporan	181.155.000	DAU		12 Laporan	200.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	<i>Kab. Blitar</i>	12 Laporan	2.628.230.400	DAU		12 Laporan	2.340.937.699
3	30	01	2.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik</i>	<i>Kab. Blitar</i>	100 Persen	105.387.698	DAU		100 Persen	500.000.000
3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	<i>Kab. Blitar</i>	1 Unit	42.635.000	DAU		1 Unit	55.000.000
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	<i>Kab. Blitar</i>	35 Unit	60.722.698	DAU		35 Unit	95.000.000
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	<i>Kab. Blitar</i>	35 Unit	2.030.000	DAU		95 Unit	30.000.000
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	<i>Kab. Blitar</i>	1 Unit	0	DAU		1 Unit	320.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
3	30	02			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk	Kab. Blitar	100 Persen	10.240.000	DAU		100 Persen	36.405.000
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah rekomendasi teknis Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan	Kab. Blitar	4 Rekomendasi	5.120.000	DAU		3 Rekomendasi	7.715.000
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Blitar	4 Dokumen	5.120.000	DAU		3 Dokumen	7.715.000
3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Blitar	60 Persen	5.120.000	DAU		50 Persen	28.690.000
3	30	02	2.06	01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Blitar	4 Laporan	0	DAU		4 Laporan	10.000.000
3	30	02	2.06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses	Kab. Blitar	5 Dokumen	0	DAU		5 Dokumen	10.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
					Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA B2	Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2							
3	30	02	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Blitar	4 Laporan	5.120.000	DAU		4 Laporan	8.690.000
3	30	03			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Kab. Blitar	92 Persen	535.000.000	DAU		92 Persen	2.962.573.297
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan dikelola dengan baik	Kab. Blitar	13 Unit	506.180.000	DAU		10 Unit	2.900.127.697
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	Kab. Blitar	13 Unit	455.613.200	DAU		13 Unit	2.785.940.497
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Blitar	13 Unit	50.566.800	DAU		13 Unit	114.187.200

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	Kab. Blitar	85 Orang	28.820.000	DAU		89 Orang	62.445.600
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Blitar	2 Dokumen	28.820.000	DAU		2 Dokumen	62.445.600
3	30	04			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kab. Blitar	75 Persen	53.818.440	DAU		75 Persen	338.100.844
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterisian kapasitas gudang barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat (terpenuhi 50%-80%)	Kab. Blitar	65 Persen	0	DAU		75 Persen	50.000.000
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Blitar	4 Laporan	0	DAU		4 Laporan	50.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten /Kota	Jumlah pasar terpantau Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di pasar	Kab. Blitar	6 Kali	39.893.440	DAU		6 Kali	248.100.844
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Blitar	6 Laporan	18.730.000	DAU		6 Laporan	7.000.000
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	6 Laporan	21.163.440	DAU		6 Laporan	201.100.844
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	Kab. Blitar	4 Kali	13.925.000	DAU		4 Kali	40.000.000
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kab. Blitar	4 Laporan	13.925.000	DAU		4 Laporan	40.000.000
3	30	05			Program Pengembangan Ekspor	Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan	Kab. Blitar	30 Persen	401.571.570	DAU		30 Persen	701.752.202

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang	Kab. Blitar	20 Persen	401.571.570	DAU		30 Persen	701.752.202
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Kab. Blitar	30 Pelaku Usaha	191.765.600	DAU		10 Pelaku Usaha	294.259.702
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kab. Blitar	20 Pelaku Usaha	59.128.800	DAU		30 Pelaku Usaha	213.582.500
3	30	05	2.01	04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Kab. Blitar	25 Pelaku Usaha	43.047.680	DAU		10 Pelaku Usaha	60.810.000
3	30	05	2.01	05	Peningkatan Produk Citra Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Kab. Blitar	20 Produk	107.629.490	DAU	Pemutakhiran pada nomenklatur dan indikator sub kegiatan	20 Produk	133.100.000
3	30	06			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kab. Blitar	75 Persen	166.000.000	DAU		75 Persen	170.325.752

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang sesuai standar	Kab. Blitar	92 Persen	166.000.000	DAU		92 Persen	170.325.752
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Blitar	14.000 Unit	117.045.140	DAU		10.000 Unit	112.271.540
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Blitar	550 Orang	48.954.860	DAU		550 Orang	58.054.212
3	30	07			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten	Kab. Blitar	75 Persen	75.929.990	DAU		75 Persen	740.806.267
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Kab. Blitar	30 Orang	75.929.990	DAU		30 Orang	740.806.267
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Kab. Blitar	20 UMKM	75.929.990	DAU		20 UMKM	740.806.267
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				845.000.000				772.023.962
3	31	02			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri	Kab. Blitar	95 Persen	791.500.000	DAU		100 Persen	400.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Kab. Blitar	10 Fasilitas	791.500.000	DAU		10 Fasilitas	400.000.000
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Kab. Blitar	1 Dokumen	-	DAU		0 Dokumen	45.000.000
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Blitar	1 Dokumen	-	DAU		1 Dokumen	45.000.000
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Blitar	2 Dokumen	75.000.000	DAU		2 Dokumen	122.500.000
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Blitar	1 Dokumen	-	DAU		1 Dokumen	72.500.000
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Blitar	2 Dokumen	716.500.000	DAU		2 Dokumen	115.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
3	31	03			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan	Kab. Blitar	100 Persen	10.000.000	DAU		100 Persen	156.550.000
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	Kab. Blitar	7 Rekomendasi	10.000.000	DAU		7 Rekomendasi	156.550.000
3	31	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kab. Blitar	1 Dokumen	5.000.000	DAU	Pemutakhiran pada nomenklatur dan indikator sub kegiatan	1 Dokumen	76.450.000
3	31	03	2.01	04	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor	Kab. Blitar	1 Dokumen	5.000.000	DAU	Pemutakhiran pada nomenklatur dan indikator sub	1 Dokumen	80.100.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
					Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat					kegiatan		
3	31	04			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase peningkatan penyediaan informasi industri	Kab. Blitar	0,02 Persen	43.500.000	DAU		0,02 Persen	215.473.962
3	31	04	2.01		<i>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah fasilitasi penyediaan informasi industri</i>	Kab. Blitar	420 Fasilitasi	43.500.000	DAU		450 Fasilitasi	215.473.962
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Blitar	2 Dokumen	43.500.000	DAU		2 Dokumen	215.473.962
					TOTAL				10.373.535.000				16.325.293.126

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar 2021-2026 tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah *“Meningkatnya Produktivitas Industri dan Perdagangan Sektor Unggulan Daerah”* dengan tiga sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar Tahun 2024

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP PD	80 / A	10.158.838.858
2	Meningkatnya Kinerja Perdagangan	PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	5.285,72 Miliar Rupiah	4.583.335.417
3	Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan	Pertumbuhan Industri	2,36%	755.418.858
		Peningkatan Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas	0,77%	

Untuk mencapai sasaran tersebut dengan terbatasnya anggaran yang tersedia maka ditetapkanlah serangkaian program dan kegiatan yang terbagi dalam dua urusan pemerintahan yaitu Urusan Perdagangan terdiri dari 7 program, 16 kegiatan, 36 sub kegiatan dan Urusan Perindustrian terdiri dari 3 program, 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan, sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1 tentang Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dijabarkan dalam 7 kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja :
 - a.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU); Rp 31.200.000,-
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 7 dokumen

- Hasil (*Outcomes*) : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) :
 - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 6%
 - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

a.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU);
Rp 18.800.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 3 laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) :
 - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 6%
 - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja :

b.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU);
Rp. 4.940.264.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN; 70 Orang/Bulan
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) :
 - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 6%
 - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

b.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU);
Rp. 42.300.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; 360 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) :
 - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 6%
 - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

b.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU);
Rp. 7.816.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; 17 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) :
 - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 6%
 - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja :

c.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU);
Rp. 250.000.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ; 10 Orang
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) :
 - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 6%
 - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja :

d.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU);
Rp. 2.204.460,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan ; 6 Paket
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) :
 - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 6%
 - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

d.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU);
Rp. 1.697.190,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan; 4 Paket
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) :
 - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 6%

- Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

d.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU);
Rp. 2.205.792,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan ; 6 Paket
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 6%
- Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

d.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU);
Rp. 5.534.460,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan ; 5 Paket
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 6%
- Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

d.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU);
Rp. 68.730.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 53 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 6%
- Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

d.6 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU); Rp. 450.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; 400 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 6%
- Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja :

f.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU);
Rp. 181.155.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan; 24 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 6%
- Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

f.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU);
Rp 2.628.230.400,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan; 12 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 6%
- Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja :

g.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU);
Rp. 42.635.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya; 1 Unit
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 6%
- Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

g.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU);
Rp. 60.722.698,-

- Keluaran (*Output*) : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya; 35 Unit
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) :
 - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 6%
 - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

g.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU); Rp. 2.030.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara; 35 unit
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) :
 - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 6%
 - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, dijabarkan dalam 2 kegiatan berikut :

a. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan, dengan indikator kinerja :

a.1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU); Rp. 5.120.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 4 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah rekomendasi teknis Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan; 4 Rekomendasi
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk; 100%

b. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelebelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :

b.1 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelebelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU); Rp. 5.120.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2); 4 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota; 50%
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk; 100%

3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dijabarkan dalam 2 kegiatan :

a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan indikator kinerja :

a.1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU); Rp. 455.613.200,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan; 13 Unit
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik; 10 unit
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; 92%

a.2 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU); Rp. 50.566.800,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; 13 Unit
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik; 10 unit
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; 92%

b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, dengan indikator kinerja :

b.1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU); Rp. 28.820.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan; 2 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina; 87 Orang
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; 92%

4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, dijabarkan dalam 3 kegiatan :

a. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :

a.1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU).
Rp 39.893.440,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan; 6 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah pasar terpantau Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di pasar; 6 Kali
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting; 75%

a.2 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU).
Rp 210.979.829,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota; 6 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah pasar terpantau Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di pasar; 6 Kali
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting; 75%

a. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :

b.1 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU).
Rp 13.925.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% ; 4 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan; 4 kali
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting; 75%

5. Program Pengembangan Ekspor, dijabarkan dalam 1 kegiatan :

a. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :

a.1 Pameran Dagang Nasional

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU);

- Keluaran (*Output*) : Rp 191.765.600,-
: Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang; 30 Pelaku Usaha
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang; 20 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan; 30%

a.2 Pameran Dagang Lokal

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU);
Rp 59.128.800,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal; 20 Pelaku Usaha
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang; 20 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan; 30%

a.3 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU);
Rp 43.047.680,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan; 20 Pelaku Usaha
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang; 25 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan; 30%

a.4 Peningkatan Citra Produk Ekspor

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU).
Rp 107.629.290,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi; 20 Produk
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang; 25 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan; 30%

6. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, diimplementasikan dalam 1 kegiatan :

a. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, dengan indikator kinerja :

a.1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU).
Rp 117.045.140,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang; 14.000 Unit
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase UTTP yang sesuai standar; 92 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 72%

a.2 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU).
Rp 48.954.860,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina; 550 Orang
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase UTTP yang sesuai standar; 92 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 72%

7. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, dijabarkan dalam 1 kegiatan :

a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan indikator kinerja :

a.1 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU).
Rp 75.929.990,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi; 20 UMKM
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri; 30 orang
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten; 90,9%

8. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, dijabarkan dalam 1 kegiatan :

a. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :

a.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU).
Rp 100.000.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri; 1 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah fasilitasi Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri; 10 fasilitasi
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri; 95%

a.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DBHCHT).
Rp 75.000.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri; 2 Dokumen

- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri; 10 fasilitasi
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri; 95%

a.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU).
Rp 716.500.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; 2 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri; 10 fasilitasi
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri; 95%

9. Program Pengendalian Izin Usaha Industri, terdiri atas 2 kegiatan:

a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota. dengan indikator kinerja:

a.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU).
Rp 5.000.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat; 1 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan; 7 Rekomendasi
- Manfaat (*Benefit*) : Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat; 0,02%

a.2 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui

Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU).
Rp. 5.000.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah fasilitasi penyediaan informasi industri; 450 Fasilitasi
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase peningkatan penyediaan informasi industri; 0,02%

10. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, terdiri atas 1 kegiatan:

a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI. IPUI. IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :

a.3 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU).
Rp. 214.918.858,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); 2 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah fasilitasi penyediaan informasi industri; 450 Fasilitasi
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase peningkatan penyediaan informasi industri; 0,02%

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BLITAR
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						10.373.535.000,00							16.325.293.126,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						10.373.535.000,00							16.325.293.126,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						9.528.535.000,00							15.553.269.164,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	6 Persen 100 Persen			-	8.285.975.000,00						6 Persen 100 Persen	10.603.305.802,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	31.200.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	0,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	18.800.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.990.380.000,00			-	-	-	-	6.758.820.329,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	4.940.264.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.601.820.329,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				360 Dokumen	42.300.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		130.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				17 Dokumen	7.816.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	250.000.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	250.000.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	0,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	80.821.902,00			-	-	-	-	390.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	2.204.460,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1.697.190,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	2.205.792,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5.534.460,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				53 Laporan	68.730.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		240.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				400 Dokumen	450.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	178.547.774,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				2 Unit	0,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				2 Unit	0,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				8 Unit	0,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		128.547.774,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.809.385.400,00			-	-	-	-	2.540.937.699,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				24 Laporan	181.155.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	2.628.230.400,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.340.937.699,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	105.387.698,00			-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	42.635.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	60.722.698,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		95.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	2.030.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		320.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah rekomendasi pemuhan komitmen perolehan izin pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dak toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100 Persen			undefined undefined	10.240.000,00						100 Persen	36.405.000,00	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-	-			-	5.120.000,00			-	-	Kab Blitar	-	7.715.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				4 Dokumen	5.120.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kab Blitar		7.715.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	5.120.000,00			-	-	-	-	28.690.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				4 Laporan	0,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2				5 Dokumen	0,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				4 Laporan	5.120.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.690.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	100 Persen			-	535.000.000,00						100 Persen	2.962.573.297,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	506.180.000,00			-	-	-	-	2.900.127.697,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				13 Unit	455.613.200,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.785.940.497,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				13 Unit	50.566.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		114.187.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	-			-	28.820.000,00			-	-	-	-	62.445.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				2 Dokumen	28.820.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		62.445.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	75 Persen			-	53.818.440,00						75 Persen	338.100.844,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				4 Laporan	0,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-			-	39.893.440,00			-	-	-	-	248.100.844,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				6 Laporan	18.730.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		47.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				6 Laporan	21.163.440,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		201.100.844,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	13.925.000,00			-	-	-	-	40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				4 Laporan	13.925.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	30 Persen 30 %			-	401.571.570,00						30 Persen 30 %	701.752.202,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	401.571.570,00			-	-	-	-	701.752.202,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				30 Pelaku Usaha	191.765.600,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		294.259.702,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				20 Pelaku Usaha	59.128.800,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		213.582.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				25 Pelaku Usaha	43.047.680,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.810.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				20 Produk	107.629.490,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		133.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	75 Persen			-	166.000.000,00						75 Persen	170.325.752,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-			-	166.000.000,00			-	-	-	-	170.325.752,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				14000 Unit	117.045.140,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		112.271.540,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				550 Orang	48.954.860,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		58.054.212,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	75 Persen			-	75.929.990,00						75 Persen	740.806.267,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-			-	75.929.990,00			-	-	-	-	740.806.267,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi</i>				20 UMKM	75.929.990,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		740.806.267,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						845.000.000,00							772.023.962,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	100 Persen			-	791.500.000,00						100 Persen	400.000.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	791.500.000,00			-	-	-	-	400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>				2 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		122.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		72.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kab Blitar		80.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	0,41 Persen			-	43.500.000,00						0,02 Persen	215.473.962,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	43.500.000,00			-	-	-	-	215.473.962,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				2 Dokumen	43.500.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		215.473.962,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	J U M L A H							10.373.535.000,00							16.325.293.126,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mengacu pada kerangka acuan yang dirumuskan dalam RKPD dan Rencana Strategis (Renstra) Periode Tahun 2021-2026.

Selain target RPJMD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), sebagai informasi sejauh mana keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan kinerja tersebut pada tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan didukung berupa ketersediaan pagu anggaran definitive sebesar Rp. 10.373.535.000,- guna menjalankan program kegiatan dari APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, baik bersumber dari APBD maupun APBN (DBHCHT).

Kami menyadari bahwa dokumen ini tidak lepas dari kekurangan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaannya. Besar harapan semua program/kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik guna meningkatnya daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar pada umumnya.

Blitar, Agustus 2023

Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar,



IEKA SUPRPTI, S.STP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19780526 199802 2 001